



## LAPORAN PENGISIAN LHKPN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT TAHUN 2023

### A. PENDAHULUAN

#### 1. UMUM

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah bentuk transparansi Penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang berintegritas dan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu sasaran utama program pencegahan korupsi. Berbagai peraturan telah ditetapkan untuk membatasi ruang gerak ASN untuk melakukan praktek korupsi. Salah satu strategi dalam rangka pencegahan praktek korupsi di lingkungan ASN khususnya bagi Penyelenggara Negara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012 tentang Pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan adalah melaporkan harta kekayaan secara *online* melalui laman <https://elhkpn.kpk.go.id> selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023.

Dengan kebijakan ini diharapkan setiap Penyelenggara Negara lebih bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. LHKPN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN dan penguatan Integritas ASN.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara agar para Penyelenggara Negara dapat memahami dan mengerti pentingnya laporan LHKPN untuk membangun budaya integritas dan membentuk integritas Aparatur dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan untuk meningkatkan kesadaran serta integritas Penyelenggara Negara dalam mengelola harta dan kewajibannya serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh Penyelenggara Negara.

## **3. RUANG LINGKUP**

Seluruh Wajib Lapori di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang meliputi :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II);
  - b. Pejabat Administrator (Eselon III);
  - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - e. Bendahara dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan;
  - f. Penyidik Pegawai Negeri (PPNS);
  - g. Pemeriksa Paten, Merek, dan Desain Industri;
- diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

## **4. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012 tentang Pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan.

## B. DATA PEGAWAI WAJIB LAPOR

Data Pegawai Wajib Lapo LHKPN Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR	KEPATUHAN (%)
1	Kanwil kemenkumham Jawa Barat	24	24	100,00%
2	Bapas Kelas I Bandung	7	7	100,00%
3	Bapas Kelas I Cirebon	5	5	100,00%
4	Bapas Kelas II Bogor	3	3	100,00%
5	Bapas Kelas II Garut	3	3	100,00%
6	Bapas Kelas II Bekasi	2	2	100,00%
7	Bapas Kelas II Subang	6	6	100,00%
8	Kanim Kelas I TPI Bandung	17	17	100,00%
9	Kanim Kelas I Non TPI Bogor	7	7	100,00%
10	Kanim Kelas I TPI Cirebon	10	10	100,00%
11	Kanim Kelas I I Non TPI Depok	14	14	100,00%
12	Kanim Kelas I Non TPI Karawang	9	9	100,00%
13	Kanim Kelas II Sukabumi	8	8	100,00%
14	Kanim Kelas I Non TPI Tasikmalaya	8	8	100,00%
15	Kanim Kelas I Non Tpi Bekasi	7	7	100,00%
16	Kanim Kelas III Non Tpi Cianjur	4	4	100,00%
17	Lapas Kelas I Cirebon	9	9	100,00%
18	Lapas Kelas I Sukamiskin	12	12	100,00%
19	Lapas Kelas IIA Banceuy	8	8	100,00%
20	Lapas Kelas IIA Bekasi	5	5	100,00%
21	Lapas Kelas IIA Bogor	4	4	100,00%
22	Lapas Kelas IIA Cibinong	4	4	100,00%
23	Lapas Kelas IIA Karawang	5	5	100,00%
24	Lapas Kelas IIA Kuningan	5	5	100,00%
25	Lapas Kelas IIA Narkotika Bandung	6	6	100,00%
26	Lapas Kelas IIA Narkotika Cirebon	4	4	100,00%
27	Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur	8	8	100,00%
28	Lapas Kelas IIA Subang	6	6	100,00%
29	Lapas Kelas IIA Perempuan Bandung	6	6	100,00%
30	Lapas Kelas IIA Cikarang	4	4	100,00%
31	Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur	6	6	100,00%
32	Lapas Khusus Kelas IIB Sentul	3	3	100,00%
33	Lapas Kelas IIB Ciamis	7	7	100,00%
34	Lapas Kelas IIB Cianjur	4	4	100,00%
35	Lapas Kelas IIB Garut	4	4	100,00%
36	Lapas Kelas IIB Indramayu	5	5	100,00%
37	Lapas Kelas IIB Majalengka	6	6	100,00%
38	Lapas Kelas IIB Purwakarta	4	4	100,00%

39	Lapas Kelas IIB Sukabumi	3	3	100,00%
40	Lapas Kelas IIB Sumedang	4	4	100,00%
41	Lapas Kelas IIB Tasikmalaya	6	6	100,00%
42	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung	6	6	100,00%
43	Lapas Kelas IIB Banjar	4	4	100,00%
44	Lapas Kelas IIB Warung Kiara	4	4	100,00%
45	Rupbasan Kelas I Bandung	5	5	100,00%
46	Rupbasan Kelas I Cirebon	3	3	100,00%
47	Rupbasan Kelas II Indramayu	2	2	100,00%
48	Rutan Kelas I Bandung	4	4	100,00%
49	Rutan Kelas I Cirebon	5	5	100,00%
50	Rutan Kelas IIB Garut	4	4	100,00%
51	Rutan Kelas IIB Depok	4	4	100,00%
52	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	4	4	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,00%</b>

Tabel Tingkat Kepatuhan Pengisian LHKPN Tahun 2022 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat

### C. HASIL YANG DICAPAI

Terpenuhinya target pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2022 dengan hasil prosentase 100 persen sebelum batas waktu pengisian LHKPN pada tanggal 31 Maret 2023.

### D. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang dilaporkan dengan metode *online* melalui laman <https://elhkpn.kpk.go.id>.

Harta kekayaan Penyelenggara Negara merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhnya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara berintegritas yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 2. Saran

Sebagai Penyelenggara Negara yang bertanggung jawab, harus mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi dengan ikut berpartisipasi melaporkan harta kekayaan kita dengan penuh kejujuran.

## E. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan.



Dibuat di : Bandung  
Pada tanggal: 20 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
R Andika Dwi Prasetya  
NIP 196712171991031002

# SCREENSHOT MONITORING PELAPORAN LHKPN TAHUN PELAPORAN 2022 DILINGKUNGAN KANTOR WILAYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2023

## Monitoring Pelaporan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 23/01/2023 00:08:52

Pelaporan LHKPN Tahun 2022

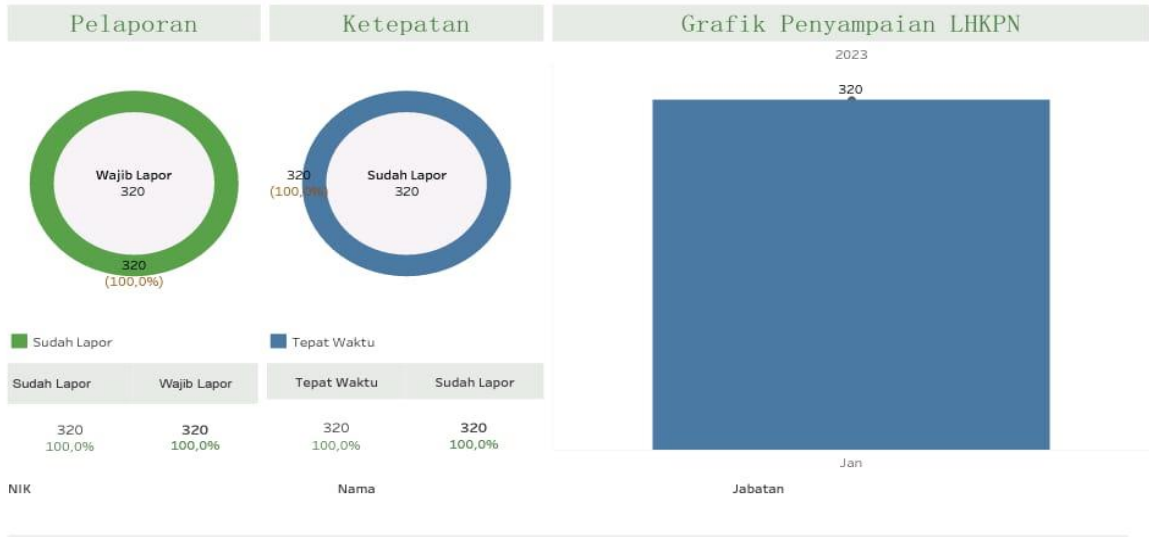
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Jenis Laporan  
All

Status UU  
Non UU

Eselon  
All

Subunit Kerja  
All



# Ikhtisar Kepatuhan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 23/01/2023 00:08:52

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Pelaporan LHKPN Tahun 2022		Jenis Laporan All		Status UU Non UU		Eselon All				
No.	Sub Unit Kerja	Wajib Laport	PN/WL Online	PN/WL Offline	Tepat Waktu	Belum Laport	Sudah Laport	Terlambat	Kepatuhan (%)	
1	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG	7	7	0	7	0	7	0	100,00%	
2	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON	5	5	0	5	0	5	0	100,00%	
3	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
4	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
5	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
6	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG	6	6	0	6	0	6	0	100,00%	
7	DIVISI ADMINISTRASI	12	12	0	12	0	12	0	100,00%	
8	DIVISI KEIMIGRASIAN	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
9	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
10	DIVISI PEMASYARAKATAN	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
11	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
12	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR	7	7	0	7	0	7	0	100,00%	
13	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	13	13	0	13	0	13	0	100,00%	
14	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
15	KANTOR IMIGRASI KELAS II CIREBON	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II DEPOK	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
17	KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
18	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	11	11	0	11	0	11	0	100,00%	
19	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	9	9	0	9	0	9	0	100,00%	
20	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
21	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	7	7	0	7	0	7	0	100,00%	
22	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI	5	5	0	5	0	5	0	100,00%	
23	KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
24	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BEKASI	6	6	0	6	0	6	0	100,00%	
25	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	8	8	0	8	0	8	0	100,00%	
26	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
27	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM J..	6	6	0	6	0	6	0	100,00%	
28	LAPAS KELAS I SUKAMISKIN	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
29	LAPAS KELAS IIA BANCEUY BANDUNG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
30	LAPAS KELAS IIA BOGOR	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
31	LAPAS KELAS IIA CIBINONG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
32	LAPAS KELAS IIA KARAWANG	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
33	LAPAS KELAS IIA KUNINGAN	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
34	LAPAS KELAS IIB CIAMIS	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
35	LAPAS KELAS IIB MAJALENGKA	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
36	LAPAS KELAS IIB SUMEDANG	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
37	LAPAS KELAS IIB TASIKMALAYA	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
38	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON	9	9	0	9	0	9	0	100,00%	
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN	8	8	0	8	0	8	0	100,00%	
40	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BA..	6	6	0	6	0	6	0	100,00%	
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI	5	5	0	5	0	5	0	100,00%	
42	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
43	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIKARANG	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
46	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
47	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PIRANG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	

**IKHTISAR KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA  
TAHUN PELAPORAN 2022  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Penarikan Data Per Tanggal : 24 Januari 2023 Jam 05:00**

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	PN/WL Online	PN/WL Offline	Sudah Lapor	Belum Lapor	Tepat Waktu	Terlambat	Kepatuhan (%)
1	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	320	320	0	320	0	320	0	100%
2	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA	101	101	0	89	12	89	0	88%
3	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	16	16	0	14	2	14	0	88%
4	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	232	232	0	200	32	200	0	86%
5	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	105	105	0	85	20	85	0	81%
6	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	91	91	0	72	19	72	0	79%
7	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	68	68	0	29	39	29	0	43%
8	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	88	88	0	37	51	37	0	42%
9	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	100	100	0	41	59	41	0	41%
10	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	157	157	0	53	104	53	0	34%
11	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	82	82	0	27	55	27	0	33%
12	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	169	169	0	43	126	43	0	25%
13	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM	24	24	0	6	18	6	0	25%
14	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	408	408	0	95	313	95	0	23%
15	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	332	332	0	77	255	77	0	23%
16	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO	65	65	0	14	51	14	0	22%
17	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT	62	62	0	13	49	13	0	21%
18	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	34	34	0	7	27	7	0	21%
19	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	88	88	0	18	70	18	0	20%
20	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	12	12	0	2	10	2	0	17%
21	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	120	120	0	20	100	20	0	17%
22	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	122	122	0	19	103	19	0	16%
23	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	97	97	0	14	83	14	0	14%
24	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	170	170	0	24	146	24	0	14%
25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	58	58	0	8	50	8	0	14%
26	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	134	134	0	18	116	18	0	13%
27	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15	15	0	2	13	2	0	13%
28	INSPEKTORAT JENDERAL	180	180	0	23	157	23	0	13%
29	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	163	163	0	20	143	20	0	12%
30	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	170	170	0	20	150	20	0	12%
31	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT	152	152	0	17	135	17	0	11%
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR	122	122	0	12	110	12	0	10%
33	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	94	94	0	9	85	9	0	10%
34	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU	100	100	0	9	91	9	0	9%
35	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG	79	79	0	7	72	7	0	9%
36	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	155	155	0	13	142	13	0	8%
37	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	60	60	0	5	55	5	0	8%
38	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	81	81	0	6	75	6	0	7%
39	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	123	123	0	9	114	9	0	7%
40	SEKRETARIAT JENDERAL	47	47	0	3	44	3	0	6%
41	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH	191	191	0	11	180	11	0	6%
42	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	36	36	0	2	34	2	0	6%
43	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	35	35	0	1	34	1	0	3%
44	WAKIL PIMPINAN	1	1	0	0	1	0	0	0%
45	STAF AHLI	5	5	0	0	5	0	0	0%
46	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	0	0	1	0	0	0%
47	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	36	36	0	0	36	0	0	0%
<b>TOTAL KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>									<b>29.68%</b>





Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ANDIKA DWI PRASETYA  
NIK : 3171071712670006  
Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Unit Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
Sub Unit Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 16 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : EGGA OKSTRADA MULYANA  
NIK : 3273231210860002  
Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Unit Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
Sub Unit Kerja : DIVISI ADMINISTRASI  
Jabatan : BENDAHARA DAN/ATAU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 10 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ADITYA AMARULLAH  
NIK : 3205013012870008  
Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Unit Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
Sub Unit Kerja : DIVISI ADMINISTRASI  
Jabatan : BENDAHARA DAN/ATAU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 16 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MOCH. KUND BEDRANINGRAT  
NIK : 3204051704680009  
Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Unit Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
Sub Unit Kerja : BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT  
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 19 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : HANIFAH  
NIK : 3275114503790001  
Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Unit Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
Sub Unit Kerja : DIVISI ADMINISTRASI  
Jabatan : PEJABAT DAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN  
JASA  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 16 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ADHE PUTRA SETIAWAN  
NIK : 3275011811800023  
Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Unit Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
Sub Unit Kerja : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI  
Jabatan : BENDAHARA DAN/ATAU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 16 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.